



Article

**ANALISIS SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN TERPADU PUSKESMAS (SP2TP)
DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS GRAJAGAN
KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI**

Eka Suci Daniyanti¹, Nailufar Firdaus²

¹Profesi Ners, Stikes Ngudia Husada Madura, Indonesia

²Administrasi Kesehatan, Stikes Ngudia Husada Madura, Indonesia

SUBMISSION TRACK

Received: August 28, 2020
Final Revision: Sept 03, 2020
Available Online: Sept 15, 2020

KEYWORDS

Pencatatan, Pelaporan, Ketepatan Waktu, SP2TP

CORRESPONDENCE

Phone: 082248069100
E-mail: ekasucidaniyanti@gmail.com

A B S T R A C T

Kegiatan pencatatan dan pelaporan puskesmas yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu di wilayah kerja puskesmas adalah SP2TP. Permasalahan SP2TP di Puskesmas Grajagan adalah belum adanya petugas pengelola atau koordinator SP2TP yang sesuai dengan bidang keahliannya. Tugas koordinator SP2TP masih dipegang oleh tenaga kesehatan yang memiliki tugas pokok lain di puskesmas tersebut, akhirnya beban kerja tenaga kesehatan menjadi bertambah dan berakibat kurang maksimalnya tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas pokoknya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) di Puskesmas Grajagan. Metode Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan jumlah 3 informan. Hasil Pelaksanaan SP2TP di Puskesmas Grajagan sudah dilaksanakan, hanya saja petugas yang melaksanakan belum sesuai dengan bidang keahliannya, sarana dan prasarana sudah difasilitasi oleh puskesmas akan tetapi belum sepenuhnya maksimal karena masih bergantian dengan petugas lain. Tidak ada pendanaan khusus untuk pelaksanaan SP2TP, akan tetapi diajukan dalam rencana kegiatan anggaran untuk setiap pelaksanaannya. Pencatatan SP2TP di Puskesmas Grajagan dilakukan oleh pemegang program masing – masing kegiatan di puskesmas. Pelaporan SP2TP di Puskesmas Grajagan dilaksanakan oleh koordinator SP2TP yang juga melaksanakan program lain di puskesmas. Ketepatan pengumpulan laporan SP2TP sudah tepat yakni sebelum tanggal 10 setiap bulannya.

I. INTRODUCTION

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 merupakan dasar penyelenggaraan pembangunan nasional yang sistematis dan berkesinambungan. Hakikat pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan kesehatan akan berhasil dan ditentukan oleh upaya antar program dan sektor yang berkesinambungan, selain itu juga ditentukan oleh upaya – upaya yang sudah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Dengan demikian rencana pembangunan kesehatan perlu disusun secara berkesinambungan. Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan di tingkat pertama di wilayah kerjanya dengan mengedepankan upaya promotif dan preventif dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi –tingginya merupakan definisi dari puskesmas (Permenkes RI No 75, 2014).

Puskesmas menyelenggarakan fungsinya yakni Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) di tingkat pertama di wilayah kerja masing – masing. Di Indonesia baik SIMPUS maupun SPT SIMPUS sudah mulai berkembang di dinas kesehatan kabupaten. Perangkat lunak yang dipergunakan untuk mencatat kunjungan pasien khususnya rawat jalan. Data catatan pasien yang berkunjung di puskesmas disimpan dan dipergunakan dalam membuat laporan periode waktu tertentu dan kemudian dikirim ke dinas kesehatan. Laporan data puskesmas kabupaten mempunyai struktur data yang sama. Sistem informasi yang dipergunakan di tingkat dinas kesehatan adalah SPT SIMPUS. Dalam memenuhi pengelolaan data yang dimiliki dinas kesehatan

mengembangkan sistem ini (Wijaya *et.al*, 2009). SK Menkes No 63/Menkes/SK/11/1981 menyatakan kegiatan dan pelaporan yang meliputi data umum, sarana, sumber daya manusia serta upaya pelayanan kesehatan masyarakat adalah definisi dari sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas (SP2TP). Konteks SP2TP, tenaga pelayanan kesehatan, tenaga pengelola dan kepala puskesmas adalah manajer yang diharapkan mampu bekerja secara tim untuk menghasilkan data yang bermutu, tepat waktu dan sesuai kebutuhan sehingga data tersebut dapat diolah menjadi informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan, baik di tingkat puskesmas maupun di tingkat administrasi di atasnya. Persyaratan atau acuan dalam penunjukan sebagai koordinator SP2TP dengan memperhatikan kemampuan dan waktu kerja yang dimiliki petugas dalam pengelolaan data SP2TP. Diupayakan koordinator SP2TP belum mempunyai tugas pokok di bagian program puskesmas lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan pekerjaan. Setelah koordinator SP2TP di tunjuk sebaiknya diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan tentang teknik pengisian formulir laporan yang baik dan akurat serta sistem pelaporan SP2TP. Berdasarkan kriteria petugas kesehatan yang layak ditunjuk sebagai koordinator SP2TP puskesmas dipilih tenaga kesehatan yang mempunyai latar belakang pendidikan statistik dan administrasi kesehatan, atau paling tidak mempunyai minat dan keinginan yang kuat untuk bekerja dalam pengolahan data puskesmas.

Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan SP2TP di mana puskesmas mengumpulkan laporan dari tiap unit kerja berupa laporan bulanan kemudian direkapitulasi dengan menggunakan formulir yang sudah tersedia dan dikirim ke Dinas Kesehatan Kota. Untuk memperoleh laporan yang lengkap dan tepat waktu telah diupayakan mengaitkannya dengan ketersediaan sarana dan fasilitas, termasuk gaji atau honor koordinator. Permasalahan yang dihadapi adalah tidak adanya petugas administrasi sebagai koordinator SP2TP, selama ini petugas koordinator merupakan

tenaga kesehatan di puskesmas tersebut, dan tugas menjadi koordinator SP2TP merupakan tugas tambahan, dengan demikian berdampak pada pelayanan yang diberikan kepada pasien kurang maksimal selain itu jam kerja tenaga kesehatan juga bertambah dan pengadministrasian akhirnya jadi tertunda. Pembagian kerja yang kurang merata kepada masing-masing tenaga kesehatan di puskesmas sampai saat ini menjadi salah satu penyebab kurangnya kualitas pelayanan kesehatan, apabila setiap pegawai tidak mendapatkan tugas yang merata mengakibatkan beban kerja tidak merata, di mana terdapat koordinator kesehatan yang harus melaksanakan beberapa tugas sekaligus. Demikian juga dengan permasalahan yang dihadapi para koordinator SP2TP yang harus melaksanakan program kegiatan puskesmas sekaligus menyusun pencatatan dan pelaporan puskesmas.

II. METHODS

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan program SP2TP di Puskesmas Grajagan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi tahun 2020. Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis dengan menggunakan wawancara mendalam. Dalam penelitian ini terdiri dari 2 informan utama dan 1 informan tambahan yakni informan utama (kepala puskesmas), koordinator SP2TP sedangkan informan tambahan yakni koordinator SP2TP Dinas Kesehatan Banyuwangi.

III. RESULT

Sumber Daya Manusia (SDM)

Penanggung jawab program SP2TP adalah kepala puskesmas yang mengetahui isi seluruh laporan terkait semua kegiatan yang dilaksanakan di wilayah kerja puskesmas. Sedangkan untuk koordinator SP2TP terdapat 1 orang. Hasil wawancara adalah jika yang menjadi koordinator SP2TP adalah lulusan D4 kebidanan selain menjadi koordinator SP2TP juga memegang program penyakit menular HIV sebagai RR CST yakni tenaga admin yang mencatat dan pelaporan tentang pasien positif HIV yang mengkonsumsi obat ARV, tugas lainnya

adalah sebagai bidan wilayah. Petugas koordinator SP2TP adalah tenaga kesehatan dibawah Ka. Tata Usaha. Koordinator SP2TP masih dipegang oleh tenaga kesehatan yang juga memiliki tugas pada program lain di puskesmas tersebut dan koordinator SP2TP ini merupakan beban tambahan diluar program yang dipegangnya. Masing – masing pemegang program melaporkan kepada koordinator SP2TP dan juga melaporkan ke masing – masing seksi pada Dinas Kesehatan Kabupaten.

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dibutuhkan sebagai penunjang membantu dalam kelancaran dalam kegiatan program SP2TP. Penunjang tersebut adalah komputer di masing – masing ruangan, wifi/jaringan internet untuk membantu sistem online ke pusat, terdapatnya buku panduan dan kendaraan yang digunakan untuk mengantarkan laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten. Sarana dan prasarana penunjang di Puskesmas Grajagan sudah memadai. Untuk sarana dan prasarana pembuatan laporan SP2TP sudah disediakan komputer meskipun tidak terdapat pada masing – masing ruangan, terdapat printer dan kertas tersendiri dan wifi/jaringan internet. Sedangkan untuk buku panduan pembuatan laporan SP2TP belum ada, dasar yang digunakan pada pelaporan SP2TP adalah format yang diberikan dari Dinkes. Pengiriman berkas laporan SP2TP oleh koordinator SP2TP menggunakan kendaraan pribadi dan diberikan pengganti uang transport. Selama ini belum ada fasilitas kendaraan dari puskesmas untuk penyerahan laporan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten.

Dana

Ketersediaan dana perlu dipenuhi agar kegiatan pencatatan dan pelaporan bisa dilaksanakan dengan baik. Adanya biaya khusus untuk pelaksanaan kegiatan baik yang sifatnya langsung untuk pelaksanaan kegiatan, ataupun biaya yang sifatnya tidak langsung yang tetap dan relatif pelaksanaan SP2TP bisa berjalan dengan lancar. Di Puskesmas Grajagan bahwa secara spesifik tidak ada khusus dalam program SP2TP, tetapi disediakan untuk transport saat konsultasi laporan, rapat dan

pengiriman laporan SP2TP ke dinas kesehatan kabupaten. Biasanya disiapkan dalam RKA (rencana kegiatan anggaran).

Pencatatan

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan hasil bahwa pencatatan SP2TP adalah koordinator SP2TP meminta laporan bulanan dari masing – masing pemegang program, selanjutnya koordinator SP2TP akan membuat laporan rekapitulasi dari masing – masing laporan yang kemudian dikumpulkan menjadi satu dan diberi daftar isi sesuai kelompok program masing – masing, didokumentasikan dan dijadikan suatu informasi berupa laporan tiap bulannya. Selain laporan bulanan dari masing – masing pemegang program, koordinator SP2TP juga mendapatkan laporan – laporan dari SIMPUS hal ini dikarenakan data SP2TP berkesinambungan dengan data SIMPUS.

Pelaporan

Kegiatan untuk menyusun sekumpulan data hasil dari pencatatan yang disampaikan kepada pihak terkait yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atau pemberitahuan hasil kegiatan yang sudah dilakukan merupakan pelaporan. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan hasil bahwa pelaporan SP2TP dilakukan oleh koordinator SP2TP untuk diverifikasi yang selanjutnya diperiksa terlebih dahulu oleh kepala puskesmas lalu ditanda tangan, jika laporan sudah lengkap selanjutnya diserahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.

Ketepatan Waktu

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan hasil bahwa laporan SP2TP yang sudah lengkap dengan tanda tangan kepala puskesmas selanjutnya disetorkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, koordinator SP2TP menyerahkan laporan SP2TP kepada Dinas Kesehatan Kabupaten sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Penyerahan laporan SP2TP oleh koordinator dilakukan secara tepat waktu dan selama ini belum pernah terjadi keterlambatan dalam penyerahan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten. Sedangkan untuk deadline penyerahan laporan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten setiap tanggal 1- 10 setiap bulannya.

IV. DISCUSSION

Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaan suatu organisasi yang memiliki tujuan dan harapan yang berbeda-beda, melalui adanya dukungan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut akan dapat meraih tujuan dan harapan yang ditargetkan. Sumber daya yang memadai akan meningkatkan keunggulan dalam pelaksanaan kegiatan program organisasi tersebut. Dalam mencapai keberhasilan sumber daya manusia adalah faktor masukan (input) terpenting. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan puskesmas yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya. Informasi manajemen puskesmas menghasilkan produk yakni pencatatan dan pelaporan terpadu, oleh karena itu dukungan dari sumber daya manusia dari segi jumlah dan kualitas sangat diperlukan (Passapari dkk, 2018).

Sedangkan pada pelaksanaan dilapangan untuk tenaga pengelola SP2TP masih belum memenuhi dari segi jumlah dan kualitasnya artinya pengelolaan SP2TP pelaksanaannya masih dilakukan oleh sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan bidang keahlian dan keilmuannya. Seharusnya koordinator SP2TP tidak merangkap menjadi pemegang program lainnya, hal ini bertujuan agar pelaksanaan dari program SP2TP menjadi lebih maksimal. Di Puskesmas Grajagan masih dilakukan oleh tenaga kesehatan pemegang program kesehatan dan pencatatan SP2TP merupakan tugas tambahan yang menjadi beban diluar tugas pokoknya, sehingga tenaga kesehatan harus berbagi tugas antara tugas pokok dan tugas tambahannya dan hal ini tidak menutup kemungkinan diantara salah satunya ada yang dilaksanakan kurang maksimal. Permasalahan lain yang muncul adalah banyak tenaga kesehatan yang ahli fungsi dan sudah banyak tenaga sebelumnya yang mengelola SP2TP banyak yang sudah pensiun. Penelitian lain yang sejalan adalah hasil penelitian Handayuni (2018) Petugas dalam pelaksanaan kegiatan SP2TP di Puskesmas Nanggalo belum sesuai jurusan atau profesi, petugas dalam pelaksanaan pencatatan dan pelaporan adalah lulusan D3 Rekam medis dan informasi kesehatan

dan hanya mempunyai 1 orang tenaga dan ditempatkan di bagian piker hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia.

Sarana dan Prasarana

Laporan SP2TP Puskesmas Grajagan dikirim masih secara manual, belum dilaksanakan secara online. Laporan SP2TP diantarkan langsung ke Dinas Kesehatan menggunakan kendaraan pribadi dari koordinator SP2TP. Untuk mendukung pelaksanaan SP2TP harus ada sarana dan prasarana yang terdiri dari komputer formulir, laporan, wifi/jaringan internet dan kendaraan untuk menyampaikan laporan SP2TP. Kendala pada pelaksanaan SP2TP di Puskesmas sudah terdapat sarana yang mendukung akan tetapi hanya terdapat di ruang kepala tata usaha dan digunakan secara bergantian untuk pelaksanaan SP2TP. Sedangkan untuk pengiriman laporan SP2TP belum ada fasilitas dari puskesmas, pengiriman menggunakan kendaraan pribadi akan tetapi ada pengganti uang transport perjalanan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sary, dkk (2020) adalah di Puskesmas wilayah Dinas Kesehatan Pasaman Barat tidak tersedianya petunjuk teknis SP2TP atau tidak adanya buku panduan SP2TP yang dimiliki puskesmas. Kegiatan program SP2TP mengacu pada contoh yang sudah tersedia dari pengalaman petugas yang melaksanakan program SP2TP yang sebelumnya sudah dilakukan.

Dana

Dana merupakan hal yang berperan penting untuk suatu kegiatan pada suatu organisasi. Pada suatu organisasi pendanaan merupakan hal yang berperan penting dalam suatu kegiatan. Perumusan tujuan dengan strategi dan program sebaik apapun perlu diikuti dengan dukungan anggaran yang sesuai. Pada penelitian ini pendanaan yang dimaksud adalah adakah dana khusus yang diberikan oleh pemerintah ke masing – masing puskesmas untuk kelancaran kegiatan program SP2TP. Pendanaan khusus untuk pelaksanaan SP2TP tidak ada, pendanaan berupa transport untuk rapat, konsultasi laporan dan pengiriman laporan SP2TP. Ketersediaan biaya merupakan prasyarat yang perlu dipenuhi agar bisa melaksanakan pencatatan dan

pelaporan yang baik. Terlaksananya kegiatan baik yang sifatnya langsung dan tidak langsung, ataupun kegiatan yang sifatnya tetap ataupun relatif tidak terlepas dari adanya dana. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sary, dkk (2020) di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat tidak adanya bantuan mengenai anggaran ke Puskesmas. Pencatatan dan pelaporan dapat dilaksanakan dengan baik jika dipenuhi prasyarat diantaranya tersedianya biaya, biaya yang sifatnya langsung untuk pelaksanaan kegiatan ataupun biaya tidak langsung yang tetap dan biaya tidak langsung yang bersifat relatif. Hasil penelitian lain yang sejalan adalah penelitian Ritonga dan mansuri (2017) tidak adanya bantuan mengenai anggaran ke Puskesmas Rantang untuk program kegiatan SP2TP. Salah satu sumber daya yang mempengaruhi terhadap kinerja adalah pendanaan dan biaya yakni sejumlah uang yang disediakan dan digunakan secara langsung agar tujuan dari suatu kegiatan bisa tercapai.

Pencatatan

Kegiatan Puskesmas yang dilakukan di dalam gedung meliputi RKK diantaranya kartu status, KTP, register kunjungan, kartu KB dan register nomor indeks, mencatat kegiatan diluar gedung puskesmas serta merekap/mencatat data kegiatan didalam dan diluar gedung puskesmas. Pencatatan SP2TP di Puskesmas Grajagan masih dengan cara manual yakni koordinator SP2TP meminta laporan bulanan pada masing – masing pemegang program, karena SP2TP berkesinambungan dengan SIMPUS pencatatan selain dari laporan bulanan dari pemegang masing – masing program juga dari laporan SIMPUS. Pencatatan dengan cara yang masih manual lebih memakan banyak waktu karena harus menunggu laporan dari masing – masing pemegang program. Pencatatat terkait laporan kegiatan bulanan lebih efektif jika langsung mensinkronisasi dengan laporan SP2TP, kesinambungan SIMPUS dan SP2TP sebenarnya sudah memudahkan untuk mengakses data secara online tabpaa harus mengumpulkan dari masing – masing pemegang program. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Handayuni (2019) di Puskesmas Nanggalo dalam pelaksanaan pencatatan

dan pelaporan masih manual, padahal di Puskesmas tersebut sudah terdapat aplikasi E-Puskesmas akan tetapi belum dimanfaatkan dengan baik. Dalam pelaksanaan pencatatan dan pelaporan SP2TP sebaiknya menggunakan aplikasi E-Puskesmas untuk mempermudah dalam proses kegiatan pencatatan dan pelaporan yang dilakukan Puskesmas Nanggalo.

Pelaporan

Pelaporan SP2TP di Puskesmas Grajagan dilaksanakan oleh koordinator SP2TP dari hasil pencatatan oleh masing – masing pemegang program di Puskesmas tersebut. Koordinator SP2TP menyusun laporan dari laporan bulanan masing – masing pemegang program kegiatan di Puskesmas. Setelah laporan terkumpul laporan dijilid satu, diperiksa oleh kepala Puskesmas. Laporan SP2TP yang sudah lengkap ditanda tangani oleh kepala Puskesmas selanjutnya di kirimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten. Kegiatan merekap data dilakukan oleh penanggung jawab program sebagai pelaksana kegiatan dan sudah sesuai dengan pedoman SP2TP (Permenkes RI Nomor 44, 2016). Kegiatan pelaporan SP2TP di Puskesmas Grajagan sudah dilaksanakan dengan baik dan sistematis meskipun demikian dalam penyusunan laporan tidak menggunakan buku panduan dan masih menggunakan format dari Dinas kesehatan berdasarkan pengalaman dari laporan – laporan sebelumnya yang sudah dilaksanakan. Pembuatan laporan merupakan menyusun kumpulan data hasil pencatatan yang disampaikan kepada pihak terkait sebagai pertanggungjawaban atau pemberitahuan hasil kegiatan yang sudah dilakukan (Passapari, 2018).

Ketepatan Waktu

Penyampaian laporan SP2TP di Puskesmas Grajagan ke Dinas Kesehatan sudah dilakukan secara tepat waktu yakni sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Laporan SP2TP harus dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten setiap tanggal 1 – 10 setiap bulannya. Penyampaian laporan secara tepat akan mempermudah dalam pengambilan keputusan, terutama jika ada laporan yang terdapat masalah dan perlu segera penanganan, dengan penyampaian laporan secara tepat waktu juga segera mengetahui terkait hasil dari setiap kegiatan

yang sudah dilakukan. Ketepatan waktu pelaporan menjadi faktor yang penting penyampaian atau penerimaan dalam arus laporan dengan pertimbangan laporan yang diperlukan sebagai bahan pengambilan suatu kebijaksanaan pada saat tertentu atau berkala, dan keterlambatan penyampaian atau penerimaan laporan menyebabkan mekanisme pengambilan keputusan akan terganggu (Passapari, 2018). Ketepatan waktu pelaporan merupakan faktor penting dalam arus laporan dan laporan diperlukan sebagai bahan pengambilan kebijaksanaan pada saat tertentu maupun secara berkala, keterlambatan penyampaian laporan berdampak pada mekanisme pengambilan keputusan (Herawati dan Purnomo, 2016).

V. CONCLUSION

Pelaksanaan program SP2TP di Puskesmas Grajagan sudah dilaksanakan akan tetapi untuk koordinator SP2TP masih merangkap dengan tugas yang lainnya, karena yang menjadi koordinator SP2TP adalah tenaga kesehatan yang juga memegang program lain di Puskesmas, dengan demikian kemungkinan untuk pelaksanaan program pokok yang ada di Puskesmas bisa dilaksanakan dengan kurang maksimal. Pencatatan SP2TP dilakukan dengan mengumpulkan laporan bulanan dari masing – masing pemegang program baik untuk kegiatan UKM ataupun UKP, selain data laporan bulanan dari masing – masing pemegang program juga mengambil data dari SIMPUS. Pelaporan SP2TP dilaksanakan sesuai dengan format yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. Pengiriman berkas laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten secara rutin sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Tidak ada pendanaan khusus untuk pelaksanaan SP2TP akan tetapi untuk konsultasi laporan, rapat terkait SP2TP dan penyerahan laporannya di masukkan ke dalam rencana kegiatan anggaran.

REFERENCES

- Handayuni, L. (2019). Analisis Pelaksanaan Sistem Pencatatan Dan Pelaporan Terpadu Puskesmas Nanggalo Padang. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 147 - 151.
- Herawati, S., & Purnomo, M. A. (2016). Rancang Bangun Sistem Informasi Pencatatan Dan Pelaporan Terpadu Puskesmas. *Jurnal Ilmiah Multitek Indonesia*, 39 - 47.
- Indonesia, P. R. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 TAHUN 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Kesehatan, K. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Kesehatan, K. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Manajemen Puskesmas*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Passapari, E., Sudirman, & Charin Nor, A. R. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Program Sistem Pencatatan Dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) DI Puskesmas Kawua Kecamatan Poso Selatan Kabupaten Poso. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 139 -150.
- Ritonga, Z. A., & Mansuri, I. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Program Sistem Pencatatan Dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) Di Puskesmas Rantang. *Jurnal Ilmiah Perekam Dan Informasi Kesehatan Imelda*, 292 - 306.
- Sary, A. N., Dewi, A., & Kurniawan, T. (2020). Analisis Pelaksanaan Proogram Sistem Pencatatan Dan Pelaporan Terpadu Puskesmas Di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Kesehatan Medika Sainika*, 1 - 10.
- Tahir , I., Ahmad, L. A., & Saptaputra, S. (2016). Evaluasi Pelaksanaan Program Sistem Pencatatan Dan Pelaporan Terpadu Puskesmas Di Puskesmas Abeli Kota Kendari Tahun 2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat*, 1 - 8.

BIOGRAPHY

First Author Eka Suci Daniyanti lahir di Banyuwangi Tanggal 22 Mei 1985, pendidikan terakhir S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fak. Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Bekerja di STIKes Ngudia Husada Madura. Karya ilmiah yang pernah dihasilkan adalah Hubungan Motivasi Terhadap Kinerja Petugas Kesehatan : Studi Kasus di Puskesmas Kalibarukulon, Banyuwangi.

Second Autho Nailufar Firdaus lahir di Sampang Tanggal 7 Desember 1989, pendidikan terakhir S2 Administrasi Publik di Untag Surabaya. Bekerja di STIKes Ngudia Husada Madura.